

Inovasi Aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Perbendaharaan Online (Sippol) Dalam Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Di Inspektorat Provinsi Jawa Timur

Anis Wahyu Rizqi

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

anis.19082@mhs.unesa.ac.id

Meirinawati

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

meirinawati@unesa.ac.id

Abstrak

Setiap akhir bulan diadakan penginputan data untuk pelaporan hasil keuangan yang dilakukan oleh pejabat daerah di seluruh Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut membuat server yang berada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah (BPKD) terkendala dikarenakan banyaknya pengguna pejabat daerah di seluruh Provinsi Jawa Timur yang menggunakan secara bersamaan, membuat kinerja semakin melambat dan mengharuskan bekerjasampai diluar jam kerja untuk menyelesaikan laporan keuangan pada akhir tahun tersebut. Sebagaimana masalah yang dirasakan oleh pegawai penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Perbendaharaan Online (SIPPOL) dan dampaknya dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan di Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Data yang digunakan penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait, serta analisis dokumen dan data yang terkait dengan implementasi SIPPOL. Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi dan membandingkan perbedaan dalam proses pengelolaan keuangan sebelum dan setelah adopsi SIPPOL. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi SIPPOL memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan di Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi SIPPOL, seperti tantangan dalam penggunaan awal aplikasi, kebutuhan akan dukungan teknis yang lebih baik, dan perubahan budaya organisasi terkait penggunaan teknologi baru. Berdasarkan temuan, penelitian ini memberikan beberapa saran bagi Inspektorat Provinsi Jawa Timur, seperti meningkatkan pelatihan dan sosialisasi tentang PPOL, memperbaiki dukungan teknis, melakukan evaluasi dan pemantauan berkala, mengembangkan fitur dan fungsionalitas aplikasi, mempertimbangkan integrasi dengan sistem lain, serta meningkatkan keamanan data.

Kata Kunci: Pelayanan Publik, Inovasi Pelayanan, SIPPOL

Abstract

At the end of each month, data entry is held for reporting financial results carried out by regional officials throughout East Java Province. This makes the server located at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKD) constrained due to the large number of users of regional officials throughout East Java Province who use it simultaneously, making performance even slower and requiring work until outside working hours to complete the financial report at the end of the year. As a problem felt by employees, this study aims to analyze the innovation of the Online Treasury Administration Information System (SIPPOL) application and its impact in improving financial management performance at the Inspectorate of East Java Province. This research was conducted using a qualitative approach and case study method. The data used in this study were obtained through in-depth interviews with relevant parties, as well as analysis of documents and data related to the implementation of SIPPOL. Data analysis was conducted by identifying and comparing differences in the financial management process before and after the adoption of SIPPOL. This study shows that the implementation of SIPPOL has had a significant impact in improving financial management performance at the East Java Provincial Inspectorate. The study also identified some of the obstacles faced in the implementation of SIPPOL, such as challenges in the initial use of the application, the need for technical support, and the need for technical support.

Keywords: Public Service, Service Innovation, SIPPOL

PENDAHULUAN

Menurut Saiman (2002) tata usaha adalah satu aktivitas pendataan dan pengaturan bermacam jenis informasi. Maksudnya ialah supaya keterangan- keterangan itu bisa dipakai langsung untuk bahan 321atau sumber informasi untuk siapa yang memerlukan, terutamanya pimpinan organisasi/perusahaan yang berkaitan. Kategorisasi tata usaha mencakup urusan kepegawaian, keuangan, persuratan/administrasi, perlengkapan pengelolaan perpustakaan dan penyusunan laporan. Menurut Ibrahim (2006) arti secara luas administrasi keuangan ialah suatu upaya pengelolaan yang mencakup semua aktivitas yang berhubungan dengan keuangan guna mencapai tujuan suatu perusahaan atau organisasi. Sedangkan dalam arti sempit (Ibrahim, 2006) administrasi keuangan adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan pencatatan pemasukan dan pengeluaran untuk pembiayaan berbagai kegiatan organisasi, dimana bentuknya berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan. Pengertian administrasi keuangan adalah proses perencanaan, penyediaan, dan penggunaan uang dalam suatu perusahaan/organisasi. Dengan kata lain, administrasi keuangan merupakan kegiatan penataan keuangan, yang mencakup penyusunan anggaran belanja, penentuan sumber dana, cara pemakaian, hingga pembukuan. Melihat hal itu dalam berjalannya proses tata usaha di suatu instansi pemerintahan maupun swasta, tentunya pengelolaan administrasi maupun keuangan merupakan suatu bagian penting yang perlu berjalan secara efektif dan efisien. Agar pengelolaan keuangan mampu berjalan secara efektif dan efisien perlu pelaporan yang valid dan terintegrasi dengan baik. Menurut Gullic (Siagina, 2003) pelaporan merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi, baik secara lisan maupun tertulis sehingga dalam penerimaan laporan dapat memperoleh gambaran bagaimana pelaksanaan tugas orang yang memberi laporan. Berpatokan pada prinsip pemerintahan yang baik terdiri dari 4 prinsip yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan koordinasi, pemerintah sejatinya harus melaksanakan pemerintahan dengan bertanggungjawab, terbuka, partisipatif, dan koordinasi dalam pelaksanaannya yang sudah didukung dengan pembagian kekuasaan yang semakin membuat pemerintah untuk senantiasa berkoordinasi antara eksekutif, legislative, dan yudikatif pada tingkatan pemerintahan yang ada di Indonesia. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri melaksanakan konsep E-Government untuk memudahkan koordinasi antara pemerintah pusat serta memantau perkembangan antar instansi pemerintah.

Sistem informasi Penatusahaan dan Perbendaharaan (SIPPOL) ini akan berjalan secara online, efisien dan mandiri tetapi tetap terawasi dari pusat yang akan memudahkan siapa saja, kapan saja dan dimana saja untuk mengakses data informasi yang diinginkan dimana faktor kelengkapan, kemutakhiran, keakuratan dan validitas data menjadi unsur yang penting dalam proses pengumpulan dan penginputan elemen data melalui sebuah sistem data dan informasi. Selanjutnya yaitu Sistem Informasi Penatusahaan dan Perbendaharaan Online (SIPPOL) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah untuk meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan pemerintah (Sutabri, 2012). Penginputan data pada aplikasi SIPPOL dilakukan setiap kali adanya proses pembayaran atau surat pertanggungjawaban (SPJ) yang masuk dan sudah terproses oleh verifikator keuangan. Terdapat beberapa sumber dana yang di input melalui SIPPOL diantara lain yaitu Surat Pertanggungjawaban (SPJ) gaji pegawai inspektorat, ganti uang (GU), langsung (LS) yang hanya dibayarkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah (BPKAD). Minimal penginputan sumber dana dalam seminggu sekali apabila semua sumber dana tersebut telah di spj kan sudah lengkap semua aspeknya kemudian di input melalui aplikasi SIPPOL. Sistem sumber dana yang dikelola oleh dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Inspektorat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disebut dengan ganti uang (GU) dan langsung (LS). Perbedaan antara sistem ganti uang (GU) dengan sistem langsung (LS) yaitu terdapat pada prosedur pencairan dana. Ganti uang (GU) sumber dana yang didapatkan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kurang dari 50 juta dicairkan melalui Bank Jatim kemudian diterima oleh bendahara Inpektorat. Dana tersebut digunakan untuk keperluan seperti belanja pengadaan barang. Sedangkan sistem langsung (LS) sumber dana yang didapatkan berasal dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) berjumlah lebih dari 50 juta. Sistemnya mengajukan surat perintah pencairan dana (SP2D) yang sudah lengkap diajukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) melalui aplikasi SIPPOL berupa belanja atau pengadaan barang yang lebih dari 50 juta. Ketika sudah terverifikasi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) sekitar seminggu kemudian dana diterima oleh bendahara Inspektorat. Penerapan aplikasi Sistem Informasi Penatusahaan dan Perbendaharaan Online (SIPPOL) ini bertujuan untuk meningkatkan dan memudahkan percepatan dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelayanan publik Inspektorat Provinsi Jawa Timur, namun dalam menjalankan program ini tidaklah mudah harus memerlukan kerjasama dan kerja keras dari setiap instansi yang terlibat. Setiap akhir bulan diadakan penginputan data untuk pelaporan hasil keuangan yang dilakukan oleh pejabat daerah di seluruh Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut membuat server yang

berada di oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah (BPKD) berkendala dikarenakan banyaknya pengguna pejabat daerah di seluruh Provinsi Jawa Timur yang menggunakan secara bersamaan, membuat kinerja semakin melambat dan mengharuskan bekerja sampai diluar jam kerja untuk menyelesaikan laporan keuangan pada akhir tahun tersebut. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 57 Tahun 2011 Pasal 3 Inspektorat merupakan badan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten atau Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten atau Kota. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekertaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitas pengawasan, pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur atau Menteri, Penyusunan laporan hasil pengawasan, pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi, pelaksanaan administrasi Inspektorat, Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan pendapat Suyanto (2017) kajian teori merupakan seperangkat proposisi yang menggambarkan suatu gejala terjadi seperti ini. Untuk memudahkan penelitian diperlukan pedoman berfikir yaitu kerangka teori. Sebelum melakukan penelitian yang lebih lanjut seorang peneliti perlu menyusun suatu kerangka teori sebagai landasan berfikir untuk menggambarkan dari sudut mana peneliti menyoroti masalah yang dipilih. Inovasi selalu dimaknai sebagai suatu temuan yang baru, di mana biasanya bentuk inovasi itu sendiri ditemukan dalam inovasi teknologi, sehingga inovasi teknologi ini dimaknai sebagai implementasi produk dan proses teknologi baru yang dapat meningkatkan cara manusia atau organisasi untuk mewujudkan tujuannya (Sa'ud, 2008). Amabile (2015) menyatakan inovasi merupakan upaya membuat, menciptakan dan mengaktualisasikan semua ide-ide, cara dan perubahan yang baru. Inovasi selalu dimaknai sebagai suatu temuan yang baru, di mana biasanya bentuk inovasi itu sendiri ditemukan dalam inovasi teknologi, sehingga inovasi teknologi ini dimaknai sebagai implementasi produk dan proses teknologi baru yang dapat meningkatkan cara manusia atau organisasi untuk mewujudkan tujuannya. Kurniawati (2009) juga menyatakan bahwa inovasi adalah suatu pembaruan

terhadap berbagai sumberdaya yang dimiliki oleh manusia dan organisasi dalam mewujudkan tujuannya, seperti penggunaan inovasi informasi teknologi (IT) yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada publik dalam mewujudkan tujuan organisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa proses inovasi dalam suatu organisasi terjadi secara terus menerus dalam kehidupan manusia, karena setiap orang dan organisasi membutuhkan ada perubahan dalam melakukan aktivitasnya sesuai dengan pembaruan, kemodernan, kemajuan teknologi dan akses informasi dan data.

METODE

Penelitian tentang “Inovasi Aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Perbendaharaan Online (SIPPOL) Dalam Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan di Inspektorat Provinsi Jawa Timur” termasuk dalam kategori penelitian deskriptif yang menggunakan metode kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berkaitan mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, serta tingkah laku yang dapat diamati dari responden yang akan diteliti. Menurut Sugiyono (2010:15), menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Data primer menurut Putri & Fanida (2021) merupakan data yang telah dikumpulkan melalui pihak pertama, pengumpulan data bisa melalui wawancara, jejak dan lain-lain. Data primer dalam penelitian diperoleh melalui hasil dari observasi. Observasi dipusatkan pada aspek perilaku tertentu yang mungkin terjadi dalam situasi dilapangan. Data primer pada penelitian ini juga diperoleh melalui wawancara atau *interview*. Peneliti menentukan beberapa informan/narasumber adalah Bapak Yuda Atmaja selaku pemegang aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Perbendaharaan (SIPPOL) Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Ibu Fifin Fitriyani selaku pejabat pengadministrasi keuangan Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Bapak Arif Wibowo selaku pejabat auditor pertama Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Bapak Andika Maulana selaku Kapala sub bidang keuangan Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Ibu Dian Angraini selaku pejabat keuangan bagian surat pertanggungjawaban (SPJ), Ibu Mega Cahyaningtyas selaku penanggungjawab bagian surat pertanggungjawaban (SPJ).

Dalam penerapan inovasinya peneliti akan menganalisis dengan menggunakan teori Dhewanto (2014) mengemukakan karakteristik inovasi el-gov terdiri dari 5 (lima) indikator meliputi: *Relative Advantage* (Keuntungan

Relative), *Image* (Gambaran), *Compability* (Kompabilitas), *Ease of Use* (Kemudahan penggunaan), dan *Use intensions* (Intensitas Penggunaan). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui data-data yang berkaitan dengan program Inovasi Aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Perbendaharaan (SIPPOL) Inspektorat Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari seluruh kegiatan penatausahaan dan perbendaharaan keuangan.

Instrument penelitian ini berupa wawancara dan observasi langsung. Sebelum melaksanakan wawancara mendalam dan observasi langsung kepada para subjek penelitian, maka dilakukan pemilihan pertimbangan subjek terlebih dahulu. Pada Penelitian ini, Narasumber yang digunakan ialah pegawai yang melaksanakan tugas bagian yang menjalankan Analisis Penerapan Sistem Informasi Penatausahaan Perbendaharaan *Online* (SIPPOL) yang berada di Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian untuk mendapatkan data, sehingga mengetahui teknik pengumpulan data, sehingga mengetahui teknik pengumpulan data adalah suatu hal kewajiban bagi peneliti agar mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan menurut Sugiyono (2013:137). Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Usman (2009:85). Usman (2009:85) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif Inovasi Aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan dan Perbendaharaan Online (SIPPOL) Di Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada bab ini, pembahasan akan dilakukan dengan menggabungkan hasil dari teknik observasi dan wawancara, sedangkan teknik dokumentasi yang berupa dokumentasi (foto, gambar, bagan) penelitian akan disajikan pada bagian lampiran.

Mengacu pada apa yang telah dijelaskan pada bab latar belakang sebelumnya Inovasi Aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan dan Perbendaharaan Online (SIPPOL) ini hadir untuk memudahkan dalam pelaporan keuangan. Sebelum adanya SIPPOL, pelaporan keuangan dilakukan secara manual dan dokumen

laporan keuangan harus dikirim ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Dengan adanya SIPPOL, proses pelaporan menjadi lebih efisien. Pengguna hanya perlu mengunggah dokumen laporan keuangan ke dalam sistem, sehingga menghemat waktu dan upaya dalam meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Di Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

Penerapan aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan dan Perbendaharaan Online (SIPPOL) ini bertujuan untuk meningkatkan dan memudahkan percepatan dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelayanan publik Inspektorat Provinsi Jawa Timur, namun dalam menjalankan program ini tidaklah mudah harus memerlukan kerjasama dan kerja keras dari setiap instansi yang terlibat. Kebijakan ini ditunjukkan untuk memberikan fasilitas dan mendorong terwujudnya sistem data dan informasi keuangan serta informasi pemerintah lainnya bagi pengambilan keputusan baik di daerah maupun di pusat. Sistem ini juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah melalui kerjasama berbasis teknologi sehingga dapat membangun database yang ada di Inspektorat Jawa Timur serta dapat menggambarkan potensi dan sumberdaya yang di miliki oleh Pemerintah Jawa Timur dalam mendukung pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan yang valid dan akurat. Inovasi ini merupakan salah satu upaya Inspektorat Provinsi Jawa Timur dalam memberikan kepuasan dalam hal pengelolaan keuangan dalam pemenuhan semua berkas yang dibutuhkan secara mudah, murah, aman, efektif dan efisien melalui Inovasi Aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan dan Perbendaharaan Online (SIPPOL) Dalam Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Di Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Merujuk hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti pada hasil penelitian diatas yang telah di paparkan maka, dapat dilakukan analisis Inovasi Aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan dan Perbendaharaan Online (SIPPOL) yang telah dilakukan Inspektorat Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan teori yang dapat dijadikan acuan penilaian baik atau kurang baiknya sebuah inovasi yang telah ada dengan penyesuaian berdasarkan lima atribut yang di kemukakan oleh Rahman (2011) yaitu *Relative advantage* (keuntungan relatif), *Image* (Gambaran), *Compability* (tingkat kompabilitas), *Ease of use* (Kemudahan Pengguna), *Use intensions* (intensitas Pengguna). Inovasi Aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan dan Perbendaharaan Online (SIPPOL) maka semua fenomena yang telah terjadi ketika dilapangan dapat dianalisis dengan teori atribut yang dikemukakan oleh Rahman (2011), sebagai berikut:

1. *Relative Advantage* (Keuntungan Relatif), *Relative Advantage* atau keuntungan relative adalah salah satu indikator dari atribut dalam inovasi pelayanan publik yang digunakan untuk mengidentifikasi nilai kebaruan dalam suatu inovasi tersebut. Dapat dikatakan juga *Relative Advantage* memperlihatkan nilai keunggulan tertentu yang dimiliki dari sebuah inovasi tersebut.

Dalam Inovasi Aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan dan Perbendaharaan Online (SIPPOL) Dalam Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Di Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Indikator atribut inovasi *Relative Advantage* menjelaskan hal-hal yang bersifat baru yang memiliki keunggulan dalam hal Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri. Nilai yang di dapat dari pejabat pengadministrasi keuangan yang menggunakan Inovasi Aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan dan Perbendaharaan Online (SIPPOL) Dalam Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Di Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

Adapun indikator yang sama dipakai pada teori atribut inovasi menurut Rogers dalam suwarno (2008). Kalimat "*Relative Advantage*" atau "Keuntungan Relatif" merujuk pada salah satu indikator atau atribut dalam inovasi pelayanan publik yang berfungsi untuk mengidentifikasi nilai kebaruan dari suatu inovasi tersebut. Dalam konteks ini, *Relative Advantage* mengacu pada kemampuan inovasi baru untuk memberikan keunggulan atau manfaat yang lebih baik dibandingkan dengan inovasi atau layanan yang sudah ada sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah di paparkan terkait dengan indikator atribut inovasi *Relative Advantage* atau keuntungan relatif maka, pejabat keuangan menunjukkan bahwa terdapat nilai kebaruan mempunyai keunggulan yang di miliki aplikasi SIPPOL. Hal ini dapat dibuktikan pernyataan dari pejabat pengadministrasi keuangan, beliau menyatakan bahwa dengan adanya Aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan dan Perbendaharaan Online (SIPPOL) Memudahkan dalam melihat mutasi atau pergerakan transaksi dan realisasi keuangan baik secara harian, mingguan, maupun bulanan. Dengan SIPPOL, pengguna dapat dengan mudah melihat dan memantau pergerakan transaksi keuangan serta realisasi keuangan secara berkala. Informasi ini dapat diakses dengan cepat dan mudah, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan keuangan. Sistem Informasi Penatausahaan Perbendaharaan Online (SIPPOL) dilengkapi dengan fitur tracking: memungkinkan pengguna untuk memantau dan mengetahui tahapan proses pengajuan dana atau penatausahaan perbendaharaan. Dengan adanya fitur ini, proses pengajuan dapat dilakukan lebih cepat dan efisien karena pengguna dapat mengetahui posisi pengajuan saat ini dan tahapan berikutnya. Meminimalisir Adanya Human Error: Penggunaan aplikasi SIPPOL dapat membantu mengurangi

kesalahan manusia (*human error*) dalam penatausahaan perbendaharaan. Dalam proses manual, terdapat risiko kesalahan penginputan atau perhitungan. Dengan menggunakan aplikasi ini, sebagian besar proses tersebut dapat diotomatiskan, mengurangi potensi kesalahan manusia dan meningkatkan akurasi data. Dari semua hasil pembahasan pada indikator atribut inovasi nilai keuntungan relatif yang telah di paparkan membuktikan bahwa hadirnya Aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan dan Perbendaharaan Online (SIPPOL), Semua tahapan pengelolaan keuangan tersebut dapat ditingkatkan secara signifikan. Dengan menggunakan SIPPOL, data keuangan yang tercatat dalam sistem dapat digunakan langsung untuk menyusun laporan keuangan. Pengguna hanya perlu mengunggah dokumen laporan keuangan yang telah diolah secara elektronik ke dalam aplikasi. Hal ini mengurangi waktu yang diperlukan dalam proses penyusunan laporan keuangan, sehingga efisiensi waktu dapat tercapai. Selain itu, dengan adanya SIPPOL, kesalahan manusia dalam penulisan dan perhitungan dapat dikurangi karena sistem secara otomatis mengolah data sesuai dengan format yang ditentukan. Ini membantu memastikan akurasi dan konsistensi laporan keuangan yang dihasilkan. Secara keseluruhan, penggunaan SIPPOL dalam penatausahaan perbendaharaan di Inspektorat Provinsi Jawa Timur akan meningkatkan efisiensi, terutama dalam hal efisiensi waktu dalam proses pembuatan laporan keuangan. Selain itu, penggunaan aplikasi ini juga dapat mengurangi risiko kesalahan manusia dan meningkatkan akurasi laporan keuangan.

2. *Image* atau gambaran adalah penjelasan atau deskripsi yang memberikan pemahaman tentang tampilan atau komponen yang ada dalam aplikasi Sistem Aplikasi Informasi Penatausahaan Perbendaharaan Online (SIPPOL). Berdasarkan hasil penelitian yang telah di paparkan terkait dengan indikator atribut inovasi image atau gambaran, Inovasi aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Perbendaharaan Online (SIPPOL) di Inspektorat Provinsi Jawa Timur sudah sesuai karena diperkuat penelitian ketika di lapangan dengan pelaku pengguna aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Perbendaharaan Online (SIPPOL) dengan pejabat pengadministrasi keuangan. Menyatakan bahwa Salah satu aspek yang diperiksa oleh verifikator keuangan adalah kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku. Proses verifikasi dilakukan dengan cermat dan teliti untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam berkas SPJ. Verifikator keuangan akan memeriksa setiap rincian dan informasi yang tercantum dalam berkas tersebut. Jika ada ketidaksesuaian atau ketidaksesuaian dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku, verifikator akan mencatatnya dan mengambil tindakan yang diperlukan. Hal ini

penting untuk memastikan integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan melakukan verifikasi terhadap berkas/dokumen SPJ, verifikator keuangan berperan penting dalam memastikan keakuratan dan keandalan informasi keuangan. Verifikasi ini juga membantu dalam mencegah penyalahgunaan dana, pengeluaran yang tidak sah, atau pelanggaran kebijakan keuangan. Dengan memastikan bahwa berkas SPJ telah diverifikasi dengan baik, organisasi dapat memastikan bahwa pengeluaran yang dilakukan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

3. *Compatibility* (Kesesuaian), adalah kecocokan atau kemudahan inovasi tersebut apakah ketika inovasi ini digunakan banyak membantu pengelolaan keuangan dalam menyelesaikan tugasnya dan sejauh mana inovasi ini dapat dinilai keberadaannya sesuai dengan kebutuhan pegawai pengelola keuangan. Kemudahan penggunaan inovasi menjadi aspek penting dari kesesuaian. Inovasi yang mudah digunakan yang akan mempercepat pengerjaan dan adaptasi oleh pengguna. Berdasarkan hasil penelitian yang telah di paparkan terkait dengan indikator atribut inovasi *Compatibility* (Kesesuaian), Inovasi aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Perbendaan Online (SIPPOL) di Inspektorat Provinsi Jawa Timur sudah sesuai karena diperkuat wawancara peneliti ketika di lapangan dengan pelaku pengguna aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Perbendaan Online (SIPPOL) yaitu Ibu Fifin selaku pejabat pengadministrasi keuangan. Beliau menyatakan bahwa. Dengan adanya kesesuaian atau kecocokan, pengguna SIPPOL di Inspektorat Provinsi Jawa Timur dapat memaksimalkan penggunaan aplikasi ini untuk memudahkan pengelolaan dan pelaporan keuangan. Mereka memiliki fleksibilitas untuk mengakses dan menggunakan aplikasi ini sesuai dengan kebutuhan mereka, tidak terbatas oleh waktu dan tempat.
4. Kemudahan Pengguna (*Ease Of Use*), Kemudahan pengguna mengacu pada tingkat kemudahan yang dirasakan penggunaan aplikasi sistem informasi penatausahaan perbendaharaan online (SIPPOL). Kemudahan pengguna adalah faktor penting dalam pengelolaan keuangan yang aman dan terjamin. Dengan mengutamakan pengalaman pengguna yang mudah, aplikasi dapat mempercepat proses pengerjaan, dan meningkatkan kepuasan pengguna. Berdasarkan hasil penelitian yang telah di paparkan terkait dengan indikator atribut Inovasi Kemudahan Pengguna (*Ease Of Use*), Inovasi aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Perbendaan Online

(SIPPOL) di Inspektorat Provinsi Jawa Timur sudah sesuai karena diperkuat wawancara peneliti ketika di lapangan dengan pelaku pengguna aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Perbendaan Online (SIPPOL) yaitu Ibu Fifin selaku pejabat pengadministrasi keuangan. Beliau menyatakan bahwa. Kemudahan penggunaan menjadi faktor penting dalam pengelolaan keuangan yang aman dan terjamin, karena dengan pengalaman pengguna yang mudah, aplikasi dapat memberikan sejumlah manfaat.

5. Intensitas pengguna (*Use intensions*), Berdasarkan hasil penelitian yang telah di paparkan terkait dengan indikator atribut inovasi Intensitas pengguna (*Use intension*) , Inovasi aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Perbendaan Online (SIPPOL) di Inspektorat Provinsi Jawa Timur sudah sesuai karena diperkuat wawancara peneliti ketika di lapangan dengan pelaku pengguna aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Perbendaan Online (SIPPOL) yaitu Bapak Yuda selaku pejabat pengadministrasi keuangan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari lima indikator dengan menggunakan indikator pelayanan publik oleh Teori Rahman (2011) yaitu Keuntungan Relatif (Relative Advantage), Gambaran (Image), Kompabilitas (Compability), Kemudahan Pengguna (Ease of use), Intensitas pengguna (Use intensions). Dapat ditarik kesimpulan bahwa Inovasi Aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Perbendaharaan Online (SIPPOL) Dalam Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Di Inspektorat Provinsi Jawa Timur telah berjalan dengan baik, adapun rinciannya sebagai berikut:

Keuntungan Relatif (*Relative Advantage*) Dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Perbendaharaan Online (SIPPOL), Inspektorat Provinsi Jawa Timur memperoleh keuntungan seperti proses yang lebih cepat, kemudahan akses, pengurangan kesalahan manusia, pengurangan penggunaan kertas, integrasi dengan laporan akuntansi, dan penggunaan tanda tangan digital. Keuntungan-keuntungan ini secara keseluruhan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan di Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Proses kinerja pengelolaan lebih cepat dikarenakan SIPPOL memiliki fitur pelacakan (*tracking*) yang memungkinkan pengguna untuk mengetahui tahapan proses pengajuan dokumen penatausahaan secara real-time. Dengan adanya fitur ini, proses pengajuan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien, sehingga mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses penatausahaan. Aplikasi SIPPOL dapat diakses dengan mudah melalui platform online. Pengguna dapat mengakses sistem ini melalui komputer atau perangkat mobile dengan koneksi internet. Kemudahan akses

ini memungkinkan pengguna untuk melakukan penatausahaan kapan pun dan di mana pun, asalkan terhubung dengan jaringan internet. Meminimalisir *Human Error* Dengan menggunakan SIPPOL, risiko kesalahan manusia (*human error*) dapat diminimalisir. SIPPOL menyediakan formulir elektronik yang memandu pengguna untuk mengisi data dengan benar dan lengkap. Selain itu, adanya validasi data otomatis juga membantu mengurangi kesalahan dalam penginputan data. Penggunaan SIPPOL mengurangi penggunaan dokumen fisik secara signifikan. Semua dokumen penatausahaan keuangan dapat diunggah dan disimpan secara elektronik dalam sistem. Hal ini mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik, menghemat ruang penyimpanan, dan mendukung upaya pengurangan penggunaan kertas (*paperless*) untuk menjaga lingkungan. Integrasi dengan Laporan Akuntansi: Dokumen penatausahaan keuangan yang terdapat dalam SIPPOL telah terintegrasi dengan sistem pelaporan akuntansi. Hal ini memudahkan pengguna dalam memperoleh laporan keuangan yang akurat dan terkini, karena data yang ada dalam SIPPOL secara otomatis terhubung dengan sistem pelaporan akuntansi. SIPPOL menggunakan tanda tangan digital untuk mengesahkan dokumen penatausahaan. Dengan adanya tanda tangan digital, tidak perlu lagi meminta tanda tangan fisik kepada Pengguna Anggaran, sehingga mengurangi waktu dan upaya yang dibutuhkan dalam proses pengesahan dokumen.

Gambaran (*Image*) Dengan menggunakan aplikasi SIPPOL, Inspektorat Provinsi Jawa Timur dapat menjalankan penatausahaan keuangan secara terintegrasi, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Aplikasi ini juga memfasilitasi kerjasama antarunit dan memastikan pemisahan peran serta kewenangan dalam proses pengelolaan keuangan. Gambaran penggunaan aplikasi (SIPPOL) Sistem Informasi Penatausahaan Perbendaharaan Online di Inspektorat Provinsi Jawa Timur Aplikasi SIPPOL di Inspektorat Provinsi Jawa Timur memiliki 3 akun yang masing-masing dikelola oleh Bendahara Pengeluaran, PPK SKPD dan Pengguna Anggaran yang digunakan sesuai kewenangannya. Seluruh kegiatan penatausahaan keuangan (mulai input data tagihan, transaksi pembayaran, pembuatan koreksi (bukti memorial), hingga pembuatan SPP baik Gaji, GU, UP maupun LS dilakukan menggunakan akun yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Seluruh transaksi yang telah disetujui oleh Bendahara akan diverifikasi oleh PPK SKPD melalui akun PPK untuk diajukan pengesahan oleh Pengguna Anggaran sebelum akhirnya dikirimkan ke BPKAD Provinsi Jawa Timur.

Kompabilitas (*Compability*) Dengan adanya aplikasi SIPPOL, Inspektorat Provinsi Jawa Timur dapat

memperoleh manfaat dalam mengelola dan memantau penatausahaan perbendaharaan secara online, meningkatkan efisiensi dalam proses pembayaran, pencatatan transaksi, serta mempermudah pengajuan koresi. SIPPOL (Sistem Informasi Penatausahaan Perbendaharaan Online) merupakan sebuah aplikasi yang digunakan di Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Aplikasi ini memiliki beberapa kegunaan yang berkaitan dengan pengajuan pembayaran, pencatatan transaksi tagihan dan pembayaran, serta pengajuan koresi. Berikut adalah penjabaran dari kegunaan aplikasi SIPPOL: Mengajukan pembayaran (SPP - SPM) Gaji, UP, GU, dan LS ke Kuasa BUD (BPKAD Provinsi Jawa Timur), Aplikasi SIPPOL memungkinkan pengguna untuk mengajukan pembayaran terkait gaji, UP, GU, dan LS kepada Kuasa BUD (BPKAD Provinsi Jawa Timur) secara online. Pengguna dapat mengisi formulir atau menginput informasi yang diperlukan untuk mengajukan pembayaran dalam aplikasi ini. Proses pengajuan pembayaran dapat dilakukan dengan cepat dan efisien melalui SIPPOL, sehingga memudahkan pihak Inspektorat Provinsi Jawa Timur dalam proses administrasi keuangan. Menginput seluruh transaksi tagihan dan pembayaran yang telah dilakukan dengan mekanisme Ganti Uang: Aplikasi SIPPOL memungkinkan pengguna untuk mencatat dan menginput seluruh transaksi tagihan dan pembayaran yang telah dilakukan menggunakan mekanisme Ganti Uang. Informasi-informasi terkait transaksi, seperti rincian tagihan, jumlah pembayaran, tanggal transaksi, dan dokumen pendukung lainnya, dapat diinput ke dalam aplikasi ini. Dengan adanya SIPPOL, proses pencatatan transaksi keuangan menjadi lebih terstruktur, terdokumentasi dengan baik, dan mudah diakses. Melakukan pengajuan koresi (Bukti Memorial) ke Kuasa BUD (BPKAD Provinsi Jawa Timur): Aplikasi SIPPOL memfasilitasi pengguna untuk melakukan pengajuan koresi atau permohonan untuk memeriksa dan mengoreksi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam dokumen pembayaran yang telah diajukan sebelumnya. Pengguna dapat mengisi formulir atau menginput informasi yang diperlukan untuk pengajuan koresi melalui aplikasi ini. Permohonan koresi beserta bukti memorial yang relevan dapat dikirimkan secara elektronik kepada Kuasa BUD (BPKAD Provinsi Jawa Timur) melalui SIPPOL.

Kemudahan Pengguna (*Ease of use*), Secara keseluruhan, aplikasi SIPPOL memberikan kemudahan dalam komunikasi, aksesibilitas, pengelolaan transaksi, kecepatan, efisiensi, dan keamanan data dalam penatausahaan perbendaharaan di Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Kemudahan saat berinteraksi melalui aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Perbendaharaan Online (SIPPOL) di Inspektorat Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut: Aksesibilitas: SIPPOL dapat diakses secara online melalui internet, memungkinkan pengguna untuk mengakses aplikasi dari mana saja dan kapan saja selama terhubung ke jaringan internet. Sebagai contoh, seorang Bendahara Pengeluaran

dapat mengakses SIPPOL dari kantor, rumah, atau lokasi lain yang memiliki koneksi internet. Hal ini memudahkan pengguna dalam menjalankan tugas administrasi keuangan tanpa harus terbatas oleh batasan geografis atau waktu. Pengelolaan Transaksi Keuangan: SIPPOL memfasilitasi pengelolaan transaksi keuangan secara online. Para pengguna, seperti Bendahara Pengeluaran, dapat memasukkan data transaksi keuangan ke dalam sistem dan mengirimkannya untuk pengesahan atau otorisasi oleh pihak yang berwenang, seperti PA/KPA. Ini mengurangi ketergantungan pada proses manual yang membutuhkan pertemuan fisik dan dokumen-dokumen, sehingga menghemat waktu dan upaya. Kecepatan dan Efisiensi: Dengan menggunakan SIPPOL, proses penatausahaan perbendaharaan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Pengguna dapat mengisi data transaksi dengan mudah, melakukan verifikasi, dan mengirimkannya melalui aplikasi. Setelah transaksi disetujui, sistem secara otomatis memprosesnya, menghitung saldo, dan menghasilkan laporan keuangan secara real-time. Hal ini mempercepat proses kerja, mengurangi risiko kesalahan manusia, dan meningkatkan efisiensi operasional. Keamanan Data: SIPPOL menjaga keamanan data dengan menyediakan lapisan keamanan yang memadai, seperti autentikasi pengguna, deskripsi data, dan akses terbatas berdasarkan peran. Ini memastikan bahwa data keuangan dan informasi sensitif lainnya terlindungi dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan. Dengan demikian, SIPPOL memberikan kepercayaan dan keamanan dalam berinteraksi dan mengelola informasi keuangan.

Intensitas pengguna (*Use intensions*) Dengan adanya perubahan dari proses offline menjadi online melalui implementasi SIPPOL, Inspektorat Provinsi Jawa Timur dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan dengan meminimalisir human error, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi ketergantungan pada proses manual yang rentan terhadap kesalahan.

Saran

Adapun saran yang diberikan penulis adalah Peningkatan dukungan teknis sangat penting untuk memastikan adanya dukungan teknis yang memadai, baik dalam hal perawatan sistem, pembaruan, maupun penanganan masalah teknis yang mungkin timbul. Inspektorat Provinsi Jawa Timur perlu memastikan adanya tim atau unit yang bertanggung jawab secara khusus terhadap pengelolaan dan dukungan teknis SIPPOL. Evaluasi dan pemantauan secara berkala yang dilakukan evaluasi rutin terhadap kinerja dan efektivitas SIPPOL, baik dari sisi penggunaan, efisiensi proses, maupun kepuasan pengguna. Peningkatan data yang lebih lanjut akan terus meningkatkan langkah-langkah kelengkapan data dalam SIPPOL, seperti implementasi lapisan keamanan tambahan, pemantauan

aktivitas pengguna, dan kebijakan akses yang ketat. Dalam mengelola informasi keuangan yang sensitif, kelengkapan data harus diutamakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang terkait dalam menyelesaikan penelitian ini:

1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP. selaku Koordinator Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
3. Dra. Meirinawati, M.AP. selaku dosen pembimbing yang selalu membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP. selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan dan bimbingan agar skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Trena Aktivia Oktariyanda, S.AP. selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan dan bimbingan agar skripsi ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar & Usman. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Amabile, R. (2009). *Making Innovation Work*. Upper Saddle River. New Jersey: Pearson Education Inc.
- Dhewanto, Wawan dkk. (2014). *Manajemen Inovasi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Ibrahim, Afriansyah (2006). *Administrasi Keuangan*. <https://osf.io/eyphz/download/?format=pdf>
- Kurniawati, Dyah. 2009. Studi Tentang Sikap Terhadap merek dan Implikasinya Pada Minat Beli Ulang. Semarang: *Universitas Diponegoro*.
- Putri, R. I. E., & Fanida, E. H. (2021). Inovasi Program Sistem Informasi Online Dokumen Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro. *Publika*, 587-600. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n4.p587-600>

- Rahman, Abdul. (2011). *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan*. Jakarta: CV Haji Mas Agung.
- Saiman. 2002. *Manajemen Sekretaris*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sa'ud, udin Saefudin. (2008). *Inovasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Siagian, Sondang P. (2003). *Teori & praktek kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sutabri, Tata. (2012). *Konsep Dasar Sistem Informasi*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Suwarno, Yogi. (2008). *Inovasi Di Sektor Publik*. Jakarta: STIA LAN Press. Uable, Hork, 2011. Addption, Innovation and Development. *Journal SMES of Management Information System*, 6,2.
- Suyanto, (2017). *Data Mining Untuk Klasifikasi dan Klasterisasi Data*. Bandung: Informatika.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 57 Tahun 2011.

